

SALINAN
NOMOR 3/2020

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16

- dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 582);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
23. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37);
 35. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11);
 37. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 16);
 38. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
 39. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
 40. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 20);
 41. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
 42. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 4);
 43. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1);

44. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 9);
45. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula sebesar Rp. 2.734.109.724.013,69 (dua trilyun tujuh ratus tiga puluh empat milyar seratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga belas rupiah enam puluh sembilan sen) berkurang sebesar Rp. 26.247.060.387,15 (dua puluh enam milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah lima belas sen) sehingga menjadi Rp. 2.707.862.663.626,54 (dua trilyun tujuh ratus tujuh milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam rupiah lima puluh empat sen) dengan rincian, sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah			
a. Semula	Rp.	2.289.322.092.017,09	
b. Berkurang	Rp.	(290.386.186.051,72)	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan			Rp. 1.998.935.905.965,37
2. Belanja daerah			
a. Semula	Rp.	2.734.109.724.013,69	
b. Berkurang	Rp.	(26.0247.060.387,15)	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan			Rp. 2.707.862.663.626,54
3. Pembiayaan daerah			
a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula	Rp.	484.625.295.873,60	
2) Bertambah	Rp.	258.139.125.664,57	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp. 742.764.421.538,17
b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	Rp.	39.837.663.877,00	
2) Berkurang	Rp.	(6.000.000.000,00)	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp. 33.837.663.877,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan			Rp. 708.926.757.661,17
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp. 0,00

(1) Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri atas:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula

Rp. 731.100.229.507,00

2) Berkurang

Rp. (198.728.812.103,72)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp. 532.371.417.403,28

b. Dana perimbangan

1) Semula

Rp. 1.224.050.117.000,00

2) Berkurang

Rp. (138.551.405.948,00)

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan

Rp. 1.085.498.711.052,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula

Rp. 334.171.745.510,09

2) Bertambah

Rp. 46.894.032.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan

Rp. 381.065.777.510,09

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Pajak Daerah

1) Semula

Rp. 621.053.137.049,00

2) Berkurang

Rp. (196.053.137.049,00)

Jumlah pajak daerah setelah perubahan

Rp. 425.000.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula

Rp. 45.724.817.200,00

2) Berkurang

Rp. (9.993.680.142,00)

	Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp.	35.731.137.058,00
c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
	1) Semula	Rp.	30.130.277.258,00	
	2) Berkurang	Rp.	(1.887.602.747,00)	
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp.	28.242.674.511,00
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
	1) Semula	Rp.	34.191.998.000,00	
	2) Bertambah	Rp.	9.205.607.834,28	
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp.	43.397.605.834,28
(3)	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:			
a.	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak			
	1) Semula	Rp.	114.205.003.000,00	
	2) Berkurang	Rp.	(7.061.398.000,00)	
	Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan		Rp.	107.143.605.000,00
b.	Dana alokasi umum			
	1) Semula	Rp.	898.383.132.000,00	
	2) Berkurang	Rp.	(87.570.256.000,00)	
	Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp.	810.812.876.000,00
c.	Dana alokasi khusus			
	1) Semula	Rp.	211.461.982.000,00	
	2) Berkurang	Rp.	(43.919.751.948,00)	
	Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan		Rp.	167.542.230.052,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. Hibah

1) Semula Rp. 96.746.600.000,00

2) Bertambah Rp. 5.668.300.000,00

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 102.414.900.000,00

b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi

1) Semula Rp. 182.924.766.510,09

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi setelah perubahan Rp. 182.924.766.510,09

c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp. 51.042.020.000,00

2) Bertambah Rp. 11.725.732.000,00

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 62.767.752.000,00

d. Bantuan keuangan dari provinsi

1) Semula Rp. 3.458.359.000,00

2) Bertambah Rp. 29.500.000.000,00

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi setelah perubahan Rp. 32.958.359.000,00

Pasal 3

(1) Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja tidak langsung

1) Semula

Rp. 1.078.989.860.250,29

2) Bertambah

Rp. 245.358.069.307,96

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan

Rp. 1.324.347.929.558,25

b. Belanja langsung

1) Semula

Rp. 1.655.119.863.763,40

2) Berkurang

Rp. (271.605.129.695,11)

Jumlah Belanja langsung setelah perubahan

Rp. 1.383.514.734.068,29

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula

Rp. 947.081.464.452,54

2) Bertambah

Rp. 48.710.237.579,55

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

Rp. 995.791.702.032,09

b. Belanja bunga

1) Semula

Rp. 0,00

2) Bertambah

Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan

Rp. 0,00

c. Belanja hibah

1) Semula

Rp. 116.449.612.951,60

2) Berkurang

Rp. (752.888.951,60)

Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp.	115.696.724.000,00
d. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp.	12.819.760.000,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp.	12.819.760.000,00
e. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp.	2.639.022.846,15	
2) Bertambah	Rp.	197.400.720.680,01	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp.	200.039.743.526,16
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	188.395.248.642,40	
2) Berkurang	Rp.	(13.714.032.770,00)	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp.	174.681.215.872,40
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	838.687.320.039,50	
2) Berkurang	Rp.	(49.736.289.899,56)	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp.	788.951.030.139,94
c. Belanja modal			
1) Semula	Rp.	628.037.295.081,50	
2) Berkurang	Rp.	(208.154.807.025,55)	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp.	419.882.488.055,95

Pasal 4

(1) Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 484.625.295.873,60

2) Bertambah Rp. 258.139.125.664,57

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 742.764.421.538,17

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp. 39.837.663.877,00

2) Berkurang Rp. (6.000.000.000,00)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 33.837.663.877,00

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 484.625.295.873,60

2) Bertambah Rp. 258.139.125.664,57

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 742.764.421.538,17

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah	Rp.	0,00		
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp.	0,00
(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:				
a. Pembentukan dana cadangan				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah	Rp.	0,00		
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan			Rp.	0,00
b. Penyertaan modal daerah				
1) Semula	Rp.	39.837.663.877,00		
2) Berkurang	Rp.	(6.000.000.000,00)		
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan			Rp.	33.837.663.877,00
c. Pembayaran pokok utang				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah	Rp.	0,00		
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan			Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi SKPD.

3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
10. Lampiran X : Daftar Penyertaan Modal.
11. Lampiran XI : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
12. Lampiran XII : Daftar Penambahan Dan Pengurangan Aset Lainnya.
13. Lampiran XIII : Daftar Dana Cadangan Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 25 September 2020

WALIKOTA MALANG,

Ttd

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 25 September 2020

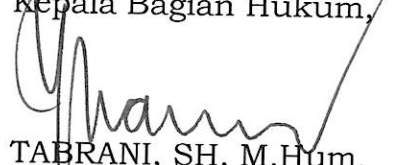
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

Ttd

WASTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 182-3/2020

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum,


TABRANI, SH, M.Hum.

Perbina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

**RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	2,289,322,092,017.09	1,998,935,905,965.37	(290,386,186,051.72)	(12.68)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	731,100,229,507.00	532,371,417,403.28	(198,728,812,103.72)	(27.18)
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	621,053,137,049.00	425,000,000,000.00	(196,053,137,049.00)	(31.56)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	45,724,817,200.00	35,731,137,058.00	(9,993,680,142.00)	(21.85)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30,130,277,258.00	28,242,674,511.00	(1,887,602,747.00)	(6.26)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34,191,998,000.00	43,397,605,834.28	9,205,607,834.28	26.92
1.2	Dana Perimbangan	1,224,050,117,000.00	1,085,498,711,052.00	(138,551,405,948.00)	(11.31)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	114,205,003,000.00	107,143,605,000.00	(7,061,398,000.00)	(6.18)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	898,383,132,000.00	810,812,876,000.00	(87,570,256,000.00)	(9.74)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	211,461,982,000.00	167,542,230,052.00	(43,919,751,948.00)	(20.76)
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	334,171,745,510.09	381,065,777,510.09	46,894,032,000.00	14.03
1.3.1	Pendapatan Hibah	96,746,600,000.00	102,414,900,000.00	5,668,300,000.00	5.85
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	182,924,766,510.09	182,924,766,510.09	0.00	0.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	51,042,020,000.00	62,767,752,000.00	11,725,732,000.00	22.97
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3,458,359,000.00	32,958,359,000.00	29,500,000,000.00	853.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2,289,322,092,017.09	1,998,935,905,965.37	(290,386,186,051.72)	(12.68)
2	BELANJA	2,734,109,724,013.69	2,707,862,663,626.54	(26,247,060,387.15)	(0.95)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,078,989,860,250.29	1,324,347,929,558.25	245,358,069,307.96	22.73
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	947,081,464,452.54	995,791,702,032.09	48,710,237,579.55	5.14
2.1.4	BELANJA HIBAH	116,449,612,951.60	115,696,724,000.00	(752,888,951.60)	(0.64)
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	12,819,760,000.00	12,819,760,000.00	0.00	0.00
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,639,022,846.15	200,039,743,526.16	197,400,720,680.01	7,480.06

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2	BELANJA LANGSUNG	1,655,119,863,763.40	1,383,514,734,068.29	(271,605,129,695.11)	(16.40)
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	188,395,248,642.40	174,681,215,872.40	(13,714,032,770.00)	(7.27)
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	838,687,320,039.50	788,951,030,139.94	(49,736,289,899.56)	(5.93)
2.2.3	BELANJA MODAL	628,037,295,081.50	419,882,488,055.95	(208,154,807,025.55)	(33.14)
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2,734,109,724,013.69	2,707,862,663,626.54	(26,247,060,387.15)	(0.96)
	Surplus / (Defisit)	(444,787,631,996.60)	(708,926,757,661.17)	(264,139,125,664.57)	0.00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	484,625,295,873.60	742,764,421,538.17	258,139,125,664.57	53.26
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	484,625,295,873.60	742,764,421,538.17	258,139,125,664.57	53.27
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	39,837,663,877.00	33,837,663,877.00	(6,000,000,000.00)	(15.06)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	39,837,663,877.00	33,837,663,877.00	(6,000,000,000.00)	(15.06)
	Pembiayaan Netto	444,787,631,996.60	708,926,757,661.17	264,139,125,664.57	59.39
		0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	0.00	0.00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

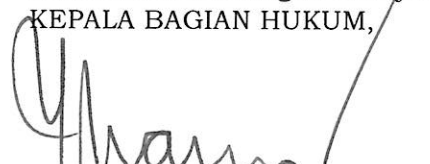
LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2020

Kode	Organisasi - Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan				Belanja						Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)		Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja	Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja	Rp	%
				Rp	%								
1	2	3	4	5=4-3	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=12-9	14
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11,000,000.00	16,000,000.00	5,000,000.00	45.45	321,709,589,905.09	193,839,735,000.00	515,549,324,905.09	429,683,562,950.09	178,698,679,008.50	608,382,241,958.59	92,832,917,053.50	(8.48)
1.01.01	01 Pendidikan	11,000,000.00	16,000,000.00	5,000,000.00	45.45	321,709,589,905.09	188,392,775,000.00	510,102,364,905.09	429,683,562,950.09	174,720,689,008.50	604,404,251,958.59	94,301,887,053.50	18.48
1.01.01	01 Kebudayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,446,960,000.00	5,446,960,000.00	0.00	3,977,990,000.00	3,977,990,000.00	(1,468,970,000.00)	(26.96)
1.01.02	SMP NEGERI 01 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,820,000.00	953,820,000.00	0.00	741,360,000.00	741,360,000.00	(212,460,000.00)	(22.27)
1.01.02	02 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,820,000.00	953,820,000.00	0.00	741,360,000.00	741,360,000.00	(212,460,000.00)	(22.27)
1.01.03	SMP NEGERI 02 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,140,000.00	1,372,140,000.00	0.00	1,108,370,000.00	1,108,370,000.00	(263,770,000.00)	(19.22)
1.01.03	03 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,140,000.00	1,372,140,000.00	0.00	1,108,370,000.00	1,108,370,000.00	(263,770,000.00)	(19.22)
1.01.04	SMP NEGERI 03 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,800,000.00	1,045,800,000.00	0.00	862,275,000.00	862,275,000.00	(183,525,000.00)	(17.54)
1.01.04	04 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,800,000.00	1,045,800,000.00	0.00	862,275,000.00	862,275,000.00	(183,525,000.00)	(17.54)
1.01.05	SMP NEGERI 04 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,660,000.00	1,122,660,000.00	0.00	865,680,000.00	865,680,000.00	(256,980,000.00)	(22.89)
1.01.05	05 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,660,000.00	1,122,660,000.00	0.00	865,680,000.00	865,680,000.00	(256,980,000.00)	(22.89)
1.01.06	SMP NEGERI 05 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,380,000.00	1,087,380,000.00	0.00	947,865,000.00	947,865,000.00	(139,515,000.00)	(12.83)
1.01.06	06 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,380,000.00	1,087,380,000.00	0.00	947,865,000.00	947,865,000.00	(139,515,000.00)	(12.83)
1.01.07	SMP NEGERI 06 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,200,000.00	970,200,000.00	0.00	797,975,000.00	797,975,000.00	(172,225,000.00)	(17.75)
1.01.07	07 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,200,000.00	970,200,000.00	0.00	797,975,000.00	797,975,000.00	(172,225,000.00)	(17.75)
1.01.08	SMP NEGERI 07 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,220,000.00	1,004,220,000.00	0.00	816,172,500.00	816,172,500.00	(188,047,500.00)	(18.72)
1.01.08	08 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,220,000.00	1,004,220,000.00	0.00	816,172,500.00	816,172,500.00	(188,047,500.00)	(18.72)
1.01.09	SMP NEGERI 08 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,180,000.00	999,180,000.00	0.00	801,215,000.00	801,215,000.00	(197,965,000.00)	(19.81)
1.01.09	09 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,180,000.00	999,180,000.00	0.00	801,215,000.00	801,215,000.00	(197,965,000.00)	(19.81)
1.01.10	SMP NEGERI 09 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,440,000.00	1,000,440,000.00	0.00	806,345,000.00	806,345,000.00	(194,095,000.00)	(19.40)
1.01.10	10 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,440,000.00	1,000,440,000.00	0.00	806,345,000.00	806,345,000.00	(194,095,000.00)	(19.40)
1.01.11	SMP NEGERI 10 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,780,000.00	1,137,780,000.00	0.00	936,285,000.00	936,285,000.00	(201,495,000.00)	(17.70)
1.01.11	11 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,780,000.00	1,137,780,000.00	0.00	936,285,000.00	936,285,000.00	(201,495,000.00)	(17.70)
1.01.12	SMP NEGERI 11 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,840,000.00	987,840,000.00	0.00	790,565,000.00	790,565,000.00	(197,275,000.00)	(19.97)
1.01.12	12 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,840,000.00	987,840,000.00	0.00	790,565,000.00	790,565,000.00	(197,275,000.00)	(19.97)
1.01.13	SMP NEGERI 12 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,460,000.00	908,460,000.00	0.00	689,295,000.00	689,295,000.00	(219,165,000.00)	(24.12)
1.01.13	13 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,460,000.00	908,460,000.00	0.00	689,295,000.00	689,295,000.00	(219,165,000.00)	(24.12)
1.01.14	SMP NEGERI 13 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,640,000.00	1,025,640,000.00	0.00	834,220,000.00	834,220,000.00	(191,420,000.00)	(18.66)
1.01.14	14 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,640,000.00	1,025,640,000.00	0.00	834,220,000.00	834,220,000.00	(191,420,000.00)	(18.66)
1.01.15	SMP NEGERI 14 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,300,000.00	1,014,300,000.00	0.00	839,075,000.00	839,075,000.00	(175,225,000.00)	(17.27)
1.01.15	15 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,300,000.00	1,014,300,000.00	0.00	839,075,000.00	839,075,000.00	(175,225,000.00)	(17.27)
1.01.16	SMP NEGERI 15 MALANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,820,000.00	1,079,820,000.00	0.00	832,077,500.00	832,077,500.00	(247,742,500.00)	(22.94)
1.01.16	16 Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,820,000.00	1,079,820,000.00	0.00	832,077,500.00	832,077,500.00	(247,742,500.00)	(22.94)

Kode	Organisasi - Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan				Belanja						Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Rp	%
				Rp	%	Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja	Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja		
1	2	3	4	5=4-3	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=12-9	14
4.06.0509	Kelurahan Bandulan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489,276,000.00	2,489,276,000.00	0.00	2,194,034,500.00	2,194,034,500.00	(295,241,500.00)	(11.86)
4.06.0509	0509 Pemerintahan Administrasi Kecamatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489,276,000.00	2,489,276,000.00	0.00	2,194,034,500.00	2,194,034,500.00	(295,241,500.00)	(11.86)
4.06.0510	Kelurahan Mulyorejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259,129,000.00	2,259,129,000.00	0.00	2,012,376,500.00	2,012,376,500.00	(246,752,500.00)	(10.92)
4.06.0510	0510 Pemerintahan Administrasi Kecamatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259,129,000.00	2,259,129,000.00	0.00	2,012,376,500.00	2,012,376,500.00	(246,752,500.00)	(10.92)
4.06.0511	Kelurahan Bakalankrajan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048,929,000.00	2,048,929,000.00	0.00	1,844,016,000.00	1,844,016,000.00	(204,913,000.00)	(10.00)
4.06.0511	0511 Pemerintahan Administrasi Kecamatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048,929,000.00	2,048,929,000.00	0.00	1,844,016,000.00	1,844,016,000.00	(204,913,000.00)	(10.00)
JUMLAH KESELURUHAN		2,289,322,092,017.09	1,998,935,905,965.37	(290,386,186,051.72)	(12.68)	1,078,989,860,250.29	1,655,119,863,763.40	2,734,109,724,013.69	1,324,347,929,568.25	1,383,514,734,068.29	2,707,862,663,626.54	(26,247,060,387.15)	(0.96)
Surplus / (Defisit)		0.00											

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

**RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
ORGANISASI : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1						2	3	4	5.00	6	7
1.01	1.01.01	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH	11,000,000.00	16,000,000.00	5,000,000.00	45.45	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C)
1.01	1.01.01	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	11,000,000.00	16,000,000.00	5,000,000.00	45.45	
1.01	1.01.01	00	00	4	1 2	Hasil Retribusi Daerah	11,000,000.00	16,000,000.00	5,000,000.00	45.45	
1.01	1.01.01	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01	1.01.01	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	
						PENDAPATAN DAERAH	11,000,000.00	16,000,000.00	5,000,000.00	45.45	
1.01	1.01.01			5		BELANJA					
1.01	1.01.01	00	00	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	321,709,589,905.09	429,683,562,950.09	107,973,973,045.00	33.56	
1.01	1.01.01	00	00	5	1 1	BELANJA PEGAWAI	321,709,589,905.09	429,683,562,950.09	107,973,973,045.00	33.56	
1.01	1.01.01					Belanja Langsung	193,839,735,000.00	178,698,679,008.50	(15,141,055,991.50)	(34.21)	
						Pendidikan	188,392,775,000.00	174,720,689,008.50	(13,672,085,991.50)	(7.25)	
1.01	1.01.01	07				Program Pelayanan Kesekretariatan	18,967,658,460.00	11,784,959,993.00	(7,182,698,467.00)	(37.86)	
1.01	1.01.01	07	001			Penyusunan dan pengembangan sistem informasi/aplikasi	173,260,000.00	123,240,000.00	(50,020,000.00)	(28.86)	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1						2	3	4	5.00	6	7
4.06	4.06.0511	22	059			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bakalankrajan	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)	
4.06	4.06.0511	22	059	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	3,300,000.00	0.00	(3,300,000.00)	(100.00)
4.06	4.06.0511	22	059	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,700,000.00	0.00	(1,700,000.00)	(100.00)
4.06	4.06.0511	22	115				Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Bakalankrajan	344,400,000.00	344,400,000.00	0.00	0.00
4.06	4.06.0511	22	115	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	344,400,000.00	344,400,000.00	0.00	0.00
4.06	4.06.0511	22	172				Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bakalankrajan	336,800,000.00	325,404,000.00	(11,396,000.00)	(3.38)
4.06	4.06.0511	22	172	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	46,800,000.00	43,940,000.00	(2,860,000.00)	(6.11)
4.06	4.06.0511	22	172	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	228,000,000.00	224,903,900.00	(3,096,100.00)	(1.35)
4.06	4.06.0511	22	172	5	2	3	BELANJA MODAL	62,000,000.00	56,560,100.00	(5,439,900.00)	(8.77)
Jumlah Belanja							2,048,929,000.00	1,844,016,000.00	(204,913,000.00)	(10.00)	
Surplus / (Defisit)							(2,048,929,000.00)	(1,844,016,000.00)	204,913,000.00	10.00	
4.06	4.06.0511	00	00	6			PEMBIAYAAN DAERAH				
4.06	4.06.0511	00	00	6	1		Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
4.06	4.06.0511	00	00	6	2		Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
Pembiayaan Netto							0.00	0.00	0.00	0.00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

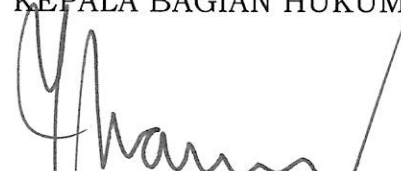
LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
			Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10	11=8+9+10	11	12
1	URUSAN WAJIB		106,341,031,430.00	590,342,584,149.00	610,969,199,751.00	1,307,652,815,330.00	95,462,809,360.00	592,769,949,731.44	397,231,157,545.95	1,085,463,916,637.39	(222,188,898,692.61)	(232.75)
1	01 Pendidikan		60,378,075,080.00	119,083,066,580.00	40,762,993,340.00	220,224,135,000.00	58,328,520,480.00	96,407,459,917.50	45,291,602,611.00	200,027,583,008.50	(20,196,551,991.50)	(9.17)
1	01 1.0101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		44,104,666,080.00	110,301,784,480.00	39,433,284,440.00	193,839,735,000.00	42,794,985,480.00	91,505,024,467.50	44,398,669,061.00	178,698,679,008.50	(15,141,055,991.50)	(7.81)
1	01 1.0101 07 Program Pelayanan Kesekretariatan		404,639,580.00	17,019,120,180.00	1,543,898,700.00	18,967,658,460.00	444,494,580.00	9,873,323,463.00	1,467,141,950.00	11,784,959,993.00	(7,182,698,467.00)	(37.86)
1	01 1.0101 07 001 Penyusunan dan pengembangan sistem informasi/aplikasi	PAD	1,960,000.00	52,880,000.00	118,420,000.00	173,260,000.00	1,880,000.00	121,360,000.00	0.00	123,240,000.00	(50,020,000.00)	(28.86)
1	01 1.0101 07 002 Penatausahaan barang milik daerah	PAD	19,580,000.00	118,365,000.00	0.00	137,945,000.00	15,400,000.00	212,545,000.00	0.00	227,945,000.00	90,000,000.00	65.24
1	01 1.0101 07 003 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	PAD	0.00	54,068,000.00	0.00	54,068,000.00	0.00	21,368,000.00	0.00	21,368,000.00	(32,700,000.00)	(60.47)
1	01 1.0101 07 004 Penyusunan laporan keuangan	PAD	95,670,000.00	180,122,000.00	0.00	275,792,000.00	95,670,000.00	90,030,000.00	0.00	185,700,000.00	(90,092,000.00)	(32.66)
1	01 1.0101 07 005 Penyusunan bahan Anjab/ABK	PAD	1,590,000.00	18,650,000.00	0.00	20,240,000.00	500,000.00	34,500,000.00	0.00	35,000,000.00	14,760,000.00	72.92
1	01 1.0101 07 006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	PAD	0.00	17,189,760.00	0.00	17,189,760.00	0.00	8,562,500.00	0.00	8,562,500.00	(8,627,260.00)	(50.18)
1	01 1.0101 07 008 Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	PAD	0.00	38,300,000.00	0.00	38,300,000.00	0.00	18,250,000.00	0.00	18,250,000.00	(20,050,000.00)	(52.34)
1	01 1.0101 07 010 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	PAD	0.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	27,200,000.00	0.00	27,200,000.00	8,200,000.00	43.15
1	01 1.0101 07 011 Sertifikasi standar mutu manajemen/pelayanan	PAD	1,500,000.00	123,500,000.00	0.00	125,000,000.00	0.00	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	(120,250,000.00)	(96.20)
1	01 1.0101 07 012 Penyusunan/reviu Renstra	PAD	0.00	21,611,000.00	0.00	21,611,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(21,611,000.00)	(100.00)
1	01 1.0101 07 013 Penyusunan Renja/RKT	PAD	1,680,000.00	102,720,000.00	0.00	104,400,000.00	1,680,000.00	56,900,000.00	0.00	58,580,000.00	(45,820,000.00)	(43.88)
1	01 1.0101 07 014 Penyusunan dan pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)	PAD	154,000,000.00	25,000,000.00	0.00	179,000,000.00	151,000,000.00	6,200,000.00	0.00	157,200,000.00	(21,800,000.00)	(12.17)
1	01 1.0101 07 015 Penyusunan profil perangkat daerah	PAD	0.00	130,112,500.00	0.00	130,112,500.00	0.00	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	(34,112,500.00)	(26.21)
1	01 1.0101 07 018 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	PAD	3,250,000.00	71,750,000.00	0.00	75,000,000.00	3,250,000.00	307,125,000.00	0.00	310,375,000.00	235,375,000.00	313.83
1	01 1.0101 07 019 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	PAD	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00
1	01 1.0101 07 020 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	PAD	3,150,000.00	221,850,000.00	0.00	225,000,000.00	3,150,000.00	191,177,500.00	0.00	194,327,500.00	(30,672,500.00)	(13.63)
1	01 1.0101 07 022 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	PAD	2,500,000.00	95,662,500.00	0.00	98,162,500.00	2,500,000.00	72,162,500.00	0.00	74,662,500.00	(23,500,000.00)	(23.93)
1	01 1.0101 07 028 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi	PAD	0.00	85,000,000.00	0.00	85,000,000.00	0.00	51,382,000.00	49,785,000.00	101,167,000.00	16,167,000.00	19.02
1	01 1.0101 07 029 Pemeliharaan taman perkantoran	PAD	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1	01 1.0101 07 031 Penyediaan jasa surat menyurat	PAD	6,080,000.00	79,901,000.00	0.00	85,981,000.00	6,080,000.00	72,431,800.00	0.00	78,511,800.00	(7,469,200.00)	(8.68)
1	01 1.0101 07 032 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	PAD	0.00	1,067,768,400.00	0.00	1,067,768,400.00	0.00	717,768,400.00	0.00	717,768,400.00	(350,000,000.00)	(32.77)
1	01 1.0101 07 034 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	PAD	0.00	165,000,000.00	0.00	165,000,000.00	0.00	164,856,100.00	0.00	164,856,100.00	(143,900.00)	(0.08)
1	01 1.0101 07 035 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	PAD	0.00	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	0.00	45,800,000.00	0.00	45,800,000.00	(19,200,000.00)	(29.53)
1	01 1.0101 07 037 Penyediaan jasa kebersihan kantor	PAD	0.00	674,545,000.00	0.00	674,545,000.00	0.00	600,545,000.00	0.00	600,545,000.00	(74,000,000.00)	(10.97)
1	01 1.0101 07 038 Penyediaan alat tulis kantor	PAD	8,563,280.00	1,495,400,720.00	0.00	1,503,964,000.00	8,563,280.00	640,544,563.00	0.00	649,107,843.00	(854,856,157.00)	(56.84)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
			Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10	11=8+9+10	11	12
4 06 4.060511 16 120	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Masyarakat di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bakalankrajan	Pendapatan Lain-Lain	1,900,000.00	18,100,000.00	0.00	20,000,000.00	250,000.00	6,350,000.00	0.00	6,600,000.00	(13,400,000.00)	(67.00)
4 06 4.060511 16 177	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bakalankrajan	Pendapatan Lain-Lain	1,000,000.00	49,000,000.00	0.00	50,000,000.00	1,000,000.00	36,050,000.00	0.00	37,050,000.00	(12,950,000.00)	(25.90)
4 06 4.060511 16 234	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat di Wilayah Kelurahan Bakalankrajan	Pendapatan Lain-Lain	1,900,000.00	13,100,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(15,000,000.00)	(100.00)
4 06 4.060511 16 291	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bakalankrajan	Pendapatan Lain-Lain	1,900,000.00	23,100,000.00	0.00	25,000,000.00	250,000.00	19,062,000.00	0.00	19,312,000.00	(5,688,000.00)	(22.75)
4 06 4.060511 16 348	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Bakalankrajan	Pendapatan Lain-Lain	2,100,000.00	17,900,000.00	0.00	20,000,000.00	250,000.00	7,200,000.00	0.00	7,450,000.00	(12,550,000.00)	(62.75)
4 06 4.060511 16 405	Penyusunan Profil Kelurahan Bakalankrajan	Pendapatan Lain-Lain	1,900,000.00	8,200,000.00	0.00	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(10,100,000.00)	(100.00)
4 06 4.060511 16 462	Pembinaan Modin dan Perawat Jenazah Kelurahan Bakalankrajan	Pendapatan Lain-Lain	50,500,000.00	0.00	0.00	50,500,000.00	56,100,000.00	0.00	0.00	56,100,000.00	5,600,000.00	11.08
4 06 4.060511 16 519	Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Kelurahan Bakalankrajan	Pendapatan Lain-Lain	109,900,000.00	0.00	0.00	109,900,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	(9,900,000.00)	(9.00)
4 06 4.060511 16 576	Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Kelurahan Bakalankrajan	Pendapatan Lain-Lain	261,700,000.00	0.00	0.00	261,700,000.00	248,500,000.00	0.00	0.00	248,500,000.00	(13,200,000.00)	(5.04)
4 06 4.060511 16 633	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bakalankrajan (DAU Tambahan)	DAU Tambahan	550,000.00	13,750,000.00	0.00	14,300,000.00	550,000.00	13,750,000.00	0.00	14,300,000.00	0.00	0.00
4 06 4.060511 17	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik		38,700,000.00	722,529,000.00	0.00	761,229,000.00	7,900,000.00	652,000,000.00	0.00	659,900,000.00	(101,329,000.00)	(13.31)
4 06 4.060511 17 059	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bakalankrajan	Pendapatan Lain-Lain	36,000,000.00	373,529,000.00	0.00	409,529,000.00	5,200,000.00	303,000,000.00	0.00	308,200,000.00	(101,329,000.00)	(24.74)
4 06 4.060511 17 116	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bakalankrajan (DAU Tambahan)	DAU Tambahan	2,700,000.00	349,000,000.00	0.00	351,700,000.00	2,700,000.00	349,000,000.00	0.00	351,700,000.00	0.00	0.00
4 06 4.060511 22	Program Pemerintahan Umum		394,500,000.00	229,700,000.00	62,000,000.00	686,200,000.00	388,340,000.00	224,903,900.00	56,560,100.00	669,804,000.00	(16,396,000.00)	(2.38)
4 06 4.060511 22 059	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bakalankrajan	Pendapatan Lain-Lain	3,300,000.00	1,700,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
4 06 4.060511 22 115	Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan Bakalankrajan	Pendapatan Lain-Lain	344,400,000.00	0.00	0.00	344,400,000.00	344,400,000.00	0.00	0.00	344,400,000.00	0.00	0.00
4 06 4.060511 22 172	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Bakalankrajan	Pendapatan Lain-Lain	46,800,000.00	228,000,000.00	62,000,000.00	336,800,000.00	43,940,000.00	224,903,900.00	56,560,100.00	325,404,000.00	(11,396,000.00)	(3.38)
JUMLAH			188,395,248,642.40	838,687,320,039.50	628,037,295,081.50	1,655,119,863,763.40	174,681,215,872.40	788,951,030,139.94	419,882,488,055.95	1,383,514,734,068.29	(271,605,129,695.11)	(155.49)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

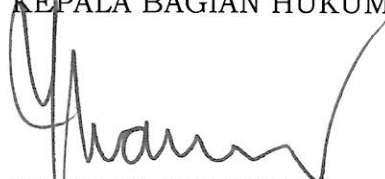
LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA MALANG
 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2020

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Belanja Tidak Langsung Sesudah		Belanja Langsung Sesudah			Jumlah Sesudah	Bertambah / (Berkurang)	
		Pegawai	Lainnya	Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Jumlah (Rp.)	%
1	2	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13	15 = 14-8	6
01	Pelayanan Umum	259,640,028,832.10	328,556,227,526.16	78,557,870,912.40	205,216,487,857.50	23,969,466,766.00	895,940,081,894.16	(108,591,127,397.42)	13.79
01	1 07 Tenaga Kerja	9,828,508,638.00	0.00	268,830,000.00	2,381,898,419.00	435,486,000.00	12,914,723,057.00	4,311,479,530.47	(25.02)
01	1 16 Komunikasi dan Informatika	6,151,998,739.00	0.00	699,662,500.00	13,440,441,259.00	1,571,277,226.00	21,863,379,724.00	3,304,595,566.27	(13.13)
01	1 24 Kearsipan	0.00	0.00	4,150,000.00	391,971,400.00	0.00	396,121,400.00	189,656,600.00	(32.37)
01	3 01 Perencanaan	6,033,813,726.00	0.00	1,100,320,000.00	5,898,373,000.00	318,534,500.00	13,351,041,226.00	4,912,251,207.68	(26.89)
01	3 02 Keuangan	83,425,685,839.10	328,556,227,526.16	5,850,058,000.00	19,997,085,940.50	4,744,900,000.00	442,573,957,305.76	(174,915,309,599.42)	65.35
01	3 03 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	6,140,583,138.00	0.00	734,139,000.00	5,786,895,618.00	262,410,000.00	12,924,027,756.00	7,899,597,721.27	(37.93)
01	3 04 Penelitian dan Pengembangan	0.00	0.00	869,400,000.00	924,860,000.00	0.00	1,794,260,000.00	980,740,000.00	(35.34)
01	4 01 Fungsi Sekretariat Daerah	21,650,603,616.00	0.00	2,632,435,500.00	39,899,250,266.00	3,291,883,004.00	67,474,172,386.00	7,246,869,064.00	(9.69)
01	4 02 Pengawasan	6,401,281,964.00	0.00	1,150,916,912.40	3,583,587,857.00	1,530,086,956.00	12,665,873,689.40	3,868,543,395.93	(23.39)
01	4 03 Pendukung Fungsi DPRD	38,082,435,519.00	0.00	647,524,000.00	52,683,357,898.00	7,264,976,450.00	98,678,293,867.00	63,345,333.00	(0.06)
01	4 06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan	81,925,117,653.00	0.00	64,600,435,000.00	60,228,766,200.00	4,549,912,630.00	211,304,231,483.00	33,547,103,783.38	(13.70)
02	Pertahanan	0.00	0.00	0.00	261,431,960.00	180,335,080.00	441,767,040.00	50,569,460.00	(10.27)
02	1 21 Persandian	0.00	0.00	0.00	261,431,960.00	180,335,080.00	441,767,040.00	50,569,460.00	(10.27)
03	Ketertiban dan ketentraman	15,550,768,508.00	0.00	5,153,424,400.00	12,040,962,487.00	370,676,720.00	33,115,832,115.00	9,740,894,791.75	(22.72)
03	1 05 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11,795,585,634.00	0.00	3,674,554,400.00	9,033,234,308.00	30,000,000.00	24,533,374,342.00	7,401,246,350.06	(23.17)
03	4 04 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	3,755,182,874.00	0.00	1,478,870,000.00	3,007,728,179.00	340,676,720.00	8,582,457,773.00	2,339,648,441.69	(21.42)
04	Ekonomi	27,836,890,741.00	0.00	1,226,177,750.00	28,823,737,076.05	13,708,266,190.00	71,595,071,757.05	18,818,528,559.41	(20.81)
04	1 13 Pemberdayaan Masyarakat Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	1 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	27,836,890,741.00	0.00	610,177,750.00	7,901,662,190.00	408,372,750.00	36,757,103,431.00	14,853,187,455.46	(28.77)
04	1 18 Penanaman Modal	0.00	0.00	188,340,000.00	2,149,154,800.00	590,170,000.00	2,927,664,800.00	(851,523,800.00)	41.01
04	1 20 Statistik	0.00	0.00	22,080,000.00	499,479,746.00	192,993,200.00	714,552,946.00	790,247,054.00	(52.51)
04	2 01 Kelautan dan Perikanan	0.00	0.00	15,640,000.00	1,056,858,000.00	263,546,000.00	1,336,044,000.00	(292,201,000.00)	27.99
04	2 03 Pertanian	0.00	0.00	39,820,000.00	561,022,800.00	32,912,000.00	633,754,800.00	288,749,400.00	(31.30)
04	2 06 Perdagangan	0.00	0.00	286,010,000.00	12,472,183,540.05	12,220,272,240.00	24,978,465,780.05	2,867,835,449.95	(10.29)
04	2 07 Perindustrian	0.00	0.00	64,110,000.00	4,183,376,000.00	0.00	4,247,486,000.00	1,162,234,000.00	(21.48)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Belanja Tidak Langsung Sesudah		Belanja Langsung Sesudah			Jumlah Sesudah	Bertambah / (Berkurang)	
		Pegawai	Lainnya	Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Jumlah (Rp.)	%
1	2	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13	15 = 14-8	6
05	Lingkungan hidup	83,318,451,755.90	0.00	5,111,695,000.00	46,987,516,231.00	16,822,854,391.00	152,240,517,377.90	36,268,748,124.47	(19.23)
05 1 11	Lingkungan Hidup	70,037,728,239.00	0.00	4,623,902,500.00	36,133,633,881.00	8,431,191,891.00	119,226,456,511.00	25,702,953,736.85	(17.73)
05 1 15	Perhubungan	13,280,723,516.90	0.00	487,792,500.00	10,853,882,350.00	8,391,662,500.00	33,014,060,866.90	10,565,794,387.62	(24.24)
05 2 04	Kehutanan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Perumahan dan fasilitas umum	16,453,199,910.00	0.00	3,606,022,000.00	124,451,118,576.91	272,491,967,548.03	417,002,308,034.94	198,280,309,308.48	(32.22)
06 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16,453,199,910.00	0.00	3,185,622,000.00	110,759,793,676.91	271,975,057,841.03	402,373,673,427.94	199,309,455,915.48	(33.12)
06 1 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0.00	0.00	420,400,000.00	13,691,324,900.00	516,909,707.00	14,628,634,607.00	(1,029,146,607.00)	7.56
06 1 10	Pertanahan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 2 05	Energi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Kesehatan	118,530,535,370.00	0.00	21,201,865,100.00	221,992,982,099.98	39,094,989,149.92	400,820,371,719.90	(62,316,983,869.62)	18.40
07 1 02	Kesehatan	118,530,535,370.00	0.00	20,807,050,100.00	219,062,501,299.98	38,259,329,149.92	396,659,415,919.90	(63,106,447,569.62)	18.91
07 1 14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0.00	0.00	394,815,000.00	2,930,480,800.00	835,660,000.00	4,160,955,800.00	789,463,700.00	(15.94)
08	Pariwisata dan budaya	0.00	0.00	143,619,000.00	5,664,334,534.00	3,684,299,000.00	9,492,252,534.00	4,792,503,466.00	(33.54)
08 1 22	Kebudayaan	0.00	0.00	117,300,000.00	3,645,140,000.00	215,550,000.00	3,977,990,000.00	1,468,970,000.00	(26.96)
08 2 02	Pariwisata	0.00	0.00	26,319,000.00	2,019,194,534.00	3,468,749,000.00	5,514,262,534.00	3,323,533,466.00	(37.60)
10	Pendidikan	445,075,072,811.09	0.00	58,635,920,480.00	104,715,912,597.50	46,614,362,461.00	655,041,268,349.59	(82,448,816,450.82)	14.39
10 1 01	Pendidikan	429,781,460,657.09	0.00	58,211,220,480.00	92,762,319,917.50	45,076,052,611.00	625,831,053,665.59	(89,344,288,760.50)	16.65
10 1 19	Kepemudaan dan Olah Raga	9,442,002,437.00	0.00	216,790,000.00	9,538,898,080.00	699,790,850.00	19,897,481,367.00	5,664,062,518.84	(22.15)
10 1 23	Perpustakaan	5,851,609,717.00	0.00	207,910,000.00	2,414,694,600.00	838,519,000.00	9,312,733,317.00	1,231,409,790.84	(11.67)
11	Perlindungan Sosial	29,386,754,104.00	0.00	1,044,621,230.00	38,796,546,720.00	2,945,270,750.00	72,173,192,804.00	11,652,434,394.90	(13.90)
11 1 06	Sosial	10,000,322,497.00	0.00	566,500,030.00	23,965,040,370.00	827,332,500.00	35,359,195,397.00	3,522,402,149.51	(9.05)
11 1 08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0.00	0.00	31,940,000.00	1,282,418,150.00	4,300,000.00	1,318,658,150.00	1,159,405,950.00	(46.78)
11 1 09	Pangan	8,593,376,700.00	0.00	134,568,800.00	2,128,286,450.00	192,963,000.00	11,049,194,950.00	3,231,541,299.34	(22.62)
11 1 12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7,004,688,738.00	0.00	157,304,300.00	7,249,626,300.00	1,572,725,000.00	15,984,344,338.00	1,550,042,536.90	(8.84)
11 4 05	Penanggulangan Bencana Daerah	3,788,366,169.00	0.00	154,308,100.00	4,171,175,450.00	347,950,250.00	8,461,799,969.00	2,189,042,459.15	(20.55)
JUMLAH		995,791,702,032.09	328,556,227,526.16	174,681,215,872.40	788,951,030,139.94	419,882,488,055.95	2,707,862,663,626.54	26,247,060,387.15	(0.96)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN PER JABATAN

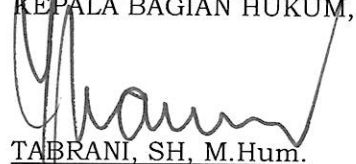
GOLONGAN	ESELON					JABATAN FUNGSIONAL	STAFF	JUMLAH PEGAWAI
	I	II	III	IV	V			
IV/e	0	0	0		0	0	0	0
IV/d	0	1	0	0	0	1	0	2
IV/c	0	24	0	0	0	19	0	43
IV/b	0	0	34	2	0	331	1	368
IV/a	0	0	69	163	0	700	9	941
Jumlah Gol IV	0	25	103	165	0	1051	10	1354
III/d	0	0	4	315	0	319	39	677
III/c	0	0	0	95	0	367	174	636
III/b	0	0	0	11	0	656	287	954
III/a	0	0	0	0	0	391	502	893
Jumlah Gol III	0	0	4	421	0	1733	1002	3160
II/d	0	0	0	0	0	96	413	509
II/c	0	0	0	0	0	73	407	480
II/b	0	0	0	0	0	8	410	418
II/a	0	0	0	0	0	1	227	228
Jumlah Gol II	0	0	0	0	0	178	1457	1635
I/d	0	0	0	0	0	0	283	283
I/c	0	0	0	0	0	0	132	132
I/b	0	0	0	0	0	0	16	16
I/a	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Gol I	0	0	0	0	0	0	431	431
TOTAL	0	25	107	586	0	2962	2900	6580

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

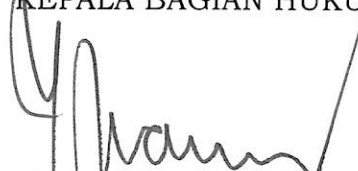
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH

NO	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
		TGL. 1-1-2019	2019	2019	TGL. 31-12-2019
1	2	3	4	5	6
1	PIUTANG PAJAK	223,972,667,235.80	46,357,742,017.83	36,220,585,017.37	234,109,824,236.26
2	PIUTANG RETRIBUSI	11,332,736,763.88	4,270,327,700.00	4,052,411,213.00	11,550,653,250.88
3	PIUTANG DANA BAGI HASIL	-	12,681,249,689.00	-	12,681,249,689.00
4	PIUTANG LAINNYA	4,161,625,116.76	1,663,737,225.63	1,765,205,628.89	4,060,156,713.50
JUMLAH		239,467,029,116.44	64,973,056,632.46	42,038,201,859.26	262,401,883,889.64

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

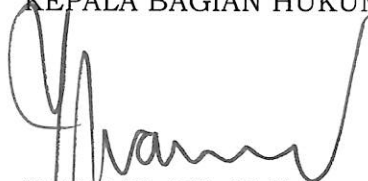
LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

**DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN
 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
 TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Kode	Judul Kegiatan	Jumlah anggaran TAHUN n-1		Jumlah Realisasi s.d akhir TA n-1	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp)TA n	
			APBD TA n-1	PERUBAHAN APBD TA n-1		APBD	PERUBAHAN APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
			NIHIL				
Jumlah			-	-	-	-	-

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PENYERTAAN MODAL TAHUN 2020

NO	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Piha k Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah (Penyertaan Modal Daerah)	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan 2019	Penyertaan modal tahun 2020	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3		5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1	2020	PDAM	Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pada BUMD	Penyertaan Modal Permanen	584,521,462,484.06	260,913,458,891.00	25,000,000,000.00	285,913,458,891.00	298,608,003,593.06	28,112,397,253.00	-	285,913,458,891.00
2	2020	PD. BPR TUGU ARTHA	Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pada BUMD	Penyertaan Modal Permanen	50,000,000,000.00	11,200,000,000.00	2,500,000,000.00	13,700,000,000.00	36,300,000,000.00	-	-	13,700,000,000.00
3	2020	PD. RUMAH POTONG HEWAN	Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pada BUMD	Penyertaan Modal Permanen	28,881,876,008.00	9,515,076,008.00	6,337,663,877.00	15,852,739,885.00	13,029,136,123.00	130,277,258.00	-	15,852,739,885.00
4	2020	BANK JATIM	Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pada BUMD	Penyertaan Modal Permanen	27,158,999,750.00	27,158,999,750.00	-	27,158,999,750.00	-	-	-	27,158,999,750.00
JUMLAH					690,562,338,242.06	308,787,534,649.00	33,837,663,877.00	342,625,198,526.00	347,937,139,716.06	28,242,674,511.00	-	342,625,198,526.00

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Perbina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

NO	JENIS INVESTASI	TAHUN PEROLEHAN	SALDO AWAL TGL. 1-1-2019	PENAMBAHAN 2019	PENGURANGAN 2019	SALDO AKHIR TGL. 31-12-2019
1	2	3	4	5	6	7
1	TANAH	-	2,660,808,950,981.00	140,873,424,200.00	155,081,993,914.00	2,646,600,381,267.00
2	PERALATAN DAN MESIN	-	767,267,896,794.71	99,232,628,015.80	14,307,794,533.00	852,192,730,277.51
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	-	1,217,954,244,534.74	79,054,483,043.86	3,869,913,731.55	1,293,138,813,847.05
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	-	2,936,534,806,454.27	81,267,460,249.00	1,026,245,359,681.99	1,991,556,907,021.28
5	ASET TETAP LAINNYA	-	62,189,152,930.01	3,426,007,403.00	27,115,950.00	65,588,044,383.01
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	34,463,337,400.00	317,732,000.00	2,145,200,000.00	32,635,869,400.00
JUMLAH			7,679,218,389,094.73	404,171,734,911.66	1,201,677,377,810.54	6,881,712,746,195.85

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	SALDO AWAL TGL. 1-1-2019	PENAMBAHAN 2019	PENGURANGAN	SALDO AKHIR TGL. 31-12-2019
					2019	
1	2	3	4	5	6	7
1	TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN	-	-	-	-	-
2	TAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	-	52,105,000.00	-	2,000,000.00	50,105,000.00
3	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	106,449,318,000.00	-	-	106,449,318,000.00
4	ASET TAK BERWUJUD	-	34,959,586,952.00	5,285,845,760.00	-	40,245,432,712.00
5	ASET LAIN YANG DIBATASI PENGUNAANNYA	-	318,494,746.46	165,504,509.04	-	483,999,255.50
6	ASET LAIN LAIN	-	72,994,557,200.52	-	-	72,994,557,200.52
JUMLAH			214,774,061,898.98	5,451,350,269.04	2,000,000.00	220,223,412,168.02

Keterangan:

1. Aset Tak Berwujud disajikan berbeda dengan neraca sebesar Rp8.449.293.987,50 karena di neraca disajikan sebesar nilai buku yaitu sesudah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp31.796.138.724,50
2. Aset Lain-lain disajikan berbeda dengan neraca sebesar Rp36.851.493.408,95 karena di neraca disajikan sebesar nilai buku yaitu sesudah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp36.143.063.791,57.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

NO	MAKSUD MENGADAKAN DANA CADANGAN	TAHUN MULAI MENGADAKAN CADANGAN DAERAH	SALDO AWAL DANA CADANGAN TAHUN 2019	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR CADANGAN TAHUN 2019	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		N I H I L					
JUMLAH							

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI